PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-10/MK/2023
KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023

Peta Strategi

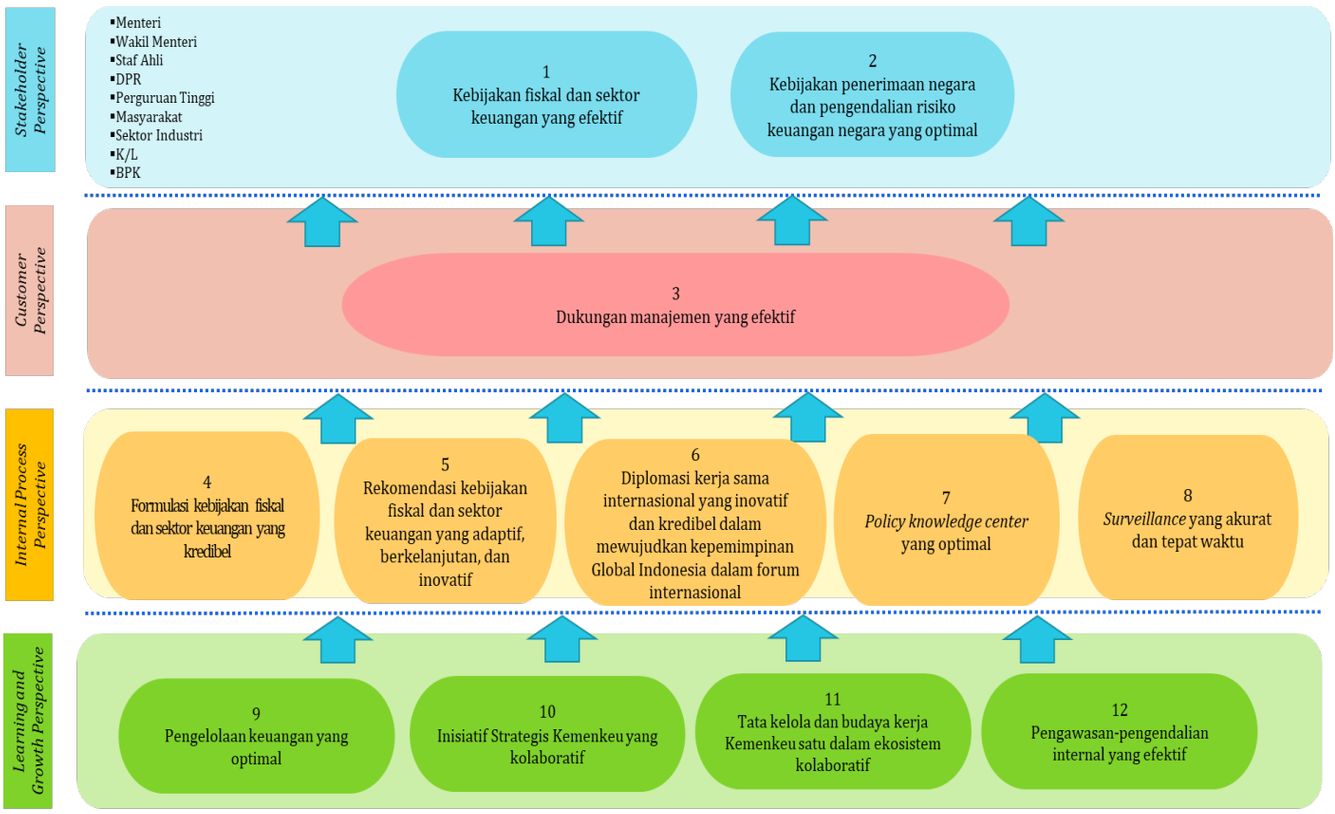

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023
KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang efektif	1a-CP	Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang berdampak pada transformasi ekonomi	86
		1b-CP	Tingkat efektivitas diplomasi keuangan internasional	85%
		1b1-CP	Tingkat efektivitas diplomasi pada *Joint Statement* ASEAN dan ASEAN+3	70%
		1b2-CP	Persentase pencapaian kerja sama ekonomi dan keuangan internasional	100%
		1c-CP	Tingkat implementasi KEM PPKF Regional	100%
2.	Kebijakan penerimaan negara dan pengendalian risiko keuangan negara yang optimal	2a-CP	Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara	100
		2b-CP	Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara	100%
3.	Dukungan manajemen yang efektif	3a-CP	Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi	86
		3b-CP	Indeks digitalisasi layanan kemenkeu	3 (skala 4)
4.	Formulasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang kredibel	4a-CP	Indeks kualitas peraturan pelaksanaan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	100
		4b-N	Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas	100
		4c-N	Indeks optimalisasi penyelesaian kebijakan FTA atau CEPA	85
5.	Rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang adaptif, berkelanjutan, dan	5a-CP	Indeks penyelesaian kebijakan pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan	100

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
	inovatif	5b-N	Persentase rekomendasi kebijakan yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan	100%
		5c-N	Indeks Pengembangan Kebijakan Anggaran Perubahan Iklim di Daerah	82,5
6.	Diplomasi kerja sama internasional yang inovatif dan kredibel dalam mewujudkan kepemimpinan Global Indonesia dalam forum internasional	6a-N	Persentase usulan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan keuangan internasional	95%
7.	*Policy knowledge center* yang optimal	7a-N	Persentase publikasi hasil kajian sesuai rencana	100%
		7b-N	Persentase pengelolaan *Knowledge Management System* yang optimal	95%
		7c-N	Persentase dukungan penguatan kapasitas ALCO regional	85%
8.	*Surveillance* yang akurat dan tepat waktu	8a-N	Persentase laporan perkembangan ekonomi keuangan yang tepat waktu	100%
9.	Pengelolaan keuangan yang optimal	9a-CP	Indeks kualitas pengelolaan Keuangan BA015	100
		9a1-CP	Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015	90,4
		9a2-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95,5%)
		9a3-N	Indeks efisiensi belanja birokrasi	85% (skala 100)
10.	Inisiatif Strategis Kemenkeu yang kolaboratif	10a-CP	Persentase penyelesaian IS dan DA Kemenkeu	92%
		10a1-CP	Persentase penyelesaian program IS Kemenkeu	92%
		10a2-CP	Tingkat penyelesaian *data analytics*	92%
		10b-CP	Persentase penyelesaian *revisit* transformasi kelembagaan	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
			Kemenkeu	
11.	Tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu satu dalam ekosistem kolaboratif	11a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan *well being*	100%
		11b-CP	Tingkat implementasi budaya Kemenkeu Satu	95%
		11b1-CP	Tingkat implementasi *Learning Oganisation*	90%
		11b2-CP	Tingkat kematangan budaya Kemenkeu Satu	100%
		11c-CP	Indeks Efektivitas ekosistem kehumasan	100 (3.55 Skala 4)
12.	Pengawasan - pengendalian internal yang efektif	12a-CP	Indeks integritas organisasi	96,42
		12a1-CP	Indeks integritas	89,26
		12a2-CP	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	100 (level 4 skala 5)
		12a3-CP	Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK	100%

	Program/Kegiatan Tahun 2023	**Anggaran**
	Program Kebijakan Fiskal	**Rp186.820.689.000**
1.	Diplomasi dan Kerjasama Ekonomi dan Keuangan	Rp 4.058.085.000
2.	Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	Rp 6.047.842.000
3.	Kajian Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	Rp 11.833.040.000
4.	Komunikasi dan Edukasi	Rp164.881.722.000
	Program Dukungan Manajemen	**Rp 41.794.967.000**
1.	Legislasi dan Litigasi	Rp 96.100.000
2.	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 28.347.543.000
3.	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp 2.650.648.000
4.	Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 10.487.366.000
5.	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp 137.850.000
6.	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	Rp 75.460.000

Jakarta, 27 Januari 2023

Menteri Keuangan

Ditandatangani Secara Elektronik

Sri Mulyani Indrawati

Kepala Badan Kebijakan Fiskal

Ditandatangani Secara Elektronik

Febrio Nathan Kacaribu

RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang efektif							
1a-CP	Indeks efektivitas kebijakan fiskal yang berdampak pada transformasi ekonomi	-	-	-	-	-	86	86
1b-CP	Tingkat efektivitas diplomasi keuangan internasional	-	85%	85%	-	85%	85%	85%
1b1-CP	Tingkat efektivitas diplomasi pada *Joint Statement* ASEAN dan ASEAN+3	-	70%	70%	-	70%	70%	70%
1b2-CP	Persentase pencapaian kerja sama ekonomi dan keuangan internasional	-	100%	100%	-	100%	100%	100%
1c-CP	Tingkat implementasi KEM PPKF Regional	-	50%	50%	-	50%	100%	100%
2	Kebijakan penerimaan negara dan pengendalian risiko keuangan negara yang optimal							
2a-CP	Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara	-	-	-	-	-	100	100
2b-CP	Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Dukungan manajemen yang efektif							
3a-CP	Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi	-	86	86	-	86	-	86
3b-CP	Indeks digitalisasi layanan Kemenkeu	-	3 (skala 4)	3 (skala 4)	-	3 (skala 4)	3 (skala 4)	3 (skala 4)

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
4	Formulasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang kredibel							
4a-CP	Indeks kualitas peraturan pelaksanaan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	-	-	-	-	-	100	100
4b-N	Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas	-	-	-	-	-	100	100
4c-N	Indeks optimalisasi penyelesaian kebijakan FTA & CEPA	-	-	-	-	-	85	85
5	Rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang adaptif, berkelanjutan, dan inovatif							
5a-CP	Indeks penyelesaian kebijakan pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan	-	-	-	-	-	100%	100%
5b-N	Persentase rekomendasi kebijakan yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan	-	-	-	-	-	100%	100%
5c-N	Indeks pengembangan kebijakan anggaran perubahan iklim di daerah	20	40	40	60	60	82,5	82,5
6	Diplomasi kerja sama internasional yang inovatif dan kredibel dalam mewujudkan kepemimpinan Global Indonesia dalam forum internasional							
6a-N	Persentase usulan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan keuangan	-	95%	95%	-	95%	95%	95%

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	internasional							
7	*Policy knowledge center* yang optimal							
7a-N	Persentase publikasi hasil kajian sesuai rencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7b-N	Persentase pengelolaan *Knowledge Management System* yang optimal	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
7c-N	Persentase dukungan penguatan kapasitas ALCO Regional	-	-	-	-	-	85%	85%
8	*Surveillance* yang akurat dan tepat waktu							
8a-N	Persentase laporan perkembangan ekonomi keuangan yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Pengelolaan keuangan yang optimal							
9a-CP	Indeks kualitas pengelolaan Keuangan BA015	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9a1-CP	Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15	-	68	68	-	68	90,4	90,4
9a2-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95,5 %)	100 (95,5%)	100 (95,5 %)	100 (95,5 %)	100 (95,5 %)	100 (95,5%)	100 (95,5%)
9a3-N	Indeks efisiensi belanja birokrasi	-	85 (Skala 100)	-	-	85 (Skala 100)	85 (Skala 100)	85 (Skala 100)
10	Inisiatif Strategis Kemenkeu yang kolaboratif							
10a-CP	Persentase penyelesaian program IS dan DA Kemenkeu	23%	46%	46%	69%	69%	92%	92%

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
10a1-CP	Persentase penyelesaian program IS Kemenkeu	23%	46%	46%	69%	69%	92%	92%
10a2-CP	Tingkat penyelesaian *data analytics*	23%	46%	46%	69%	69%	92%	92%
10b-CP	Persentase penyelesaian revisit transformasi kelembagaan Kemenkeu	-	100%	100%	-	100%	100%	100%
11	Tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu satu dalam ekosistem kolaboratif							
11a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan *well being*	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11b-CP	Tingkat implementasi budaya Kemenkeu Satu	-	20%	20%	-	20%	95%	95%
11b1-CP	Tingkat implementasi *Learning Oganisation*	-	-	-	-	-	90%	90%
11b2-CP	Tingkat kematangan budaya Kemenkeu Satu	-	20%	20%	-	20%	100%	100%
11c-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	-	100 (3.55 Skala 4)	100 (3.55 Skala 4)	-	100 (3.55 Skala 4)	100 (3.55 Skala 4)	100 (3.55 Skala 4)
12	Pengawasan - pengendalian internal yang efektif							
12a-CP	Indeks integritas organisasi	-	-	-	-	-	96,42	96,42
12a1-CP	Indeks integritas	-	-	-	-	-	89,26	89,26
12a2-CP	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	-	-	-	-	-	100 (level 4 skala 5)	100 (level 4 skala 5)
12a3-CP	Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK	-	-	-	-	-	100	100

Kepala Badan Kebijakan Fiskal,

Ditandatangani Secara Elektronik

Febrio Nathan Kacaribu

INISIATIF STRATEGIS
KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023

No	IKU	Inisiatif Strategis	*Output* / Outcome	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1.	Indeks Integritas Organisasi	Pelaksanaan Tahapan-tahapan Proses Dukungan ZI WBK UEII di lingkungan BKF	Terlaksananya tahapan-tahapan dalam rangka mendukung ZI WBK	Pemenuhan Persyaratan dan Pengisian Lembar Kerja Evaluasi melalui Aplikasi Digital *Integrity Assessment* (DIA) oleh Unit Kerja	Lembar Kerja Evaluasi pada Aplikasi Digital Integrity Assessment (DIA)	Triwulan I s.d. Triwulan II 2023	BKF	-
				Koordinasi Pelaksanaan Survei Hasil Pembangunan Zona Integritas	Nota Dinas dalam rangka Koordinasi Pelaksanaan Survei Hasil Pembangunan Zona Integritas	Triwulan III s.d. Triwulan IV 2023		

Kepala Badan Kebijakan Fiskal

Ditandatangani Secara Elektronik

Febrio Nathan Kacaribu

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2023

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Febrio Nathan Kacaribu, SE, MIDEC, PhD	NAMA	Sri Mulyani Indrawati
NIP	197802272021211003	NIP	-
PANGKAT/ GOL RUANG	, _/_	PANGKAT/ GOL RUANG	-
JABATAN	Kepala Badan Kebijakan Fiskal	JABATAN	Menteri Keuangan
UNIT KERJA	Badan Kebijakan Fiskal	UNIT KERJA	Kementerian Keuangan

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang efektif (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Indeks efektivitas kebijakan fiskal yang berdampak pada transformasi ekonomi	86	Penerima Layanan
2.	Kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang efektif (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Tingkat efektivitas diplomasi keuangan internasional	85	Penerima Layanan
3.	Kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang efektif (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Tingkat implementasi KEM PPKF Regional	100	Penerima Layanan

4.	Kebijakan penerimaan negara dan pengendalian risiko keuangan negara yang optimal (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara	100	Penerima Layanan
5.	Kebijakan penerimaan negara dan pengendalian risiko keuangan negara yang optimal (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara	100	Penerima Layanan
6.	Dukungan manajemen yang efektif (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi	86	Penerima Layanan
7.	Dukungan manajemen yang efektif (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Indeks digitalisasi layanan Kemenkeu	3	Penerima Layanan
8.	Formulasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang kredibel (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Indeks kualitas peraturan pelaksanaan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	100	Proses Bisnis
9.	Formulasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang kredibel (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas	100	Proses Bisnis
10.	Formulasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang kredibel (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Indeks optimalisasi penyelesaian kebijakan FTA & CEPA	85	Proses Bisnis
11.	Rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang adaptif, berkelanjutan, dan inovatif (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Indeks penyelesaian kebijakan pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan	100	Proses Bisnis

12.	Rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang adaptif, berkelanjutan, dan inovatif (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Persentase rekomendasi kebijakan yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan	100	Proses Bisnis
13.	Rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang adaptif, berkelanjutan, dan inovatif (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Indeks pengembangan kebijakan anggaran perubahan iklim di daerah	82,5	Proses Bisnis
14.	Diplomasi kerja sama internasional yang inovatif dan kredibel dalam mewujudkan kepemimpinan Global Indonesia dalam forum internasional (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Persentase usulan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan keuangan internasional	95	Proses Bisnis
15.	Policy knowledge center yang optimal (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Persentase publikasi hasil kajian sesuai rencana	100	Proses Bisnis
16.	Policy knowledge center yang optimal (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Persentase pengelolaan Knowledge Management System yang optimal	95	Proses Bisnis
17.	Policy knowledge center yang optimal (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Persentase dukungan penguatan kapasitas ALCO Regional	100	Proses Bisnis
18.	Surveillance yang akurat dan tepat waktu (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Persentase laporan perkembangan ekonomi keuangan yang tepat waktu	100	Proses Bisnis
19.	Pengelolaan keuangan yang optimal (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Indeks kualitas pengelolaan Keuangan BA015	100	Penguatan Internal atau Anggaran
20.	Inisiatif Strategis Kemenkeu yang kolaboratif (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Persentase penyelesaian program IS dan DA Kemenkeu	92	Penguatan Internal atau Anggaran

21.	Inisiatif Strategis Kemenkeu yang kolaboratif (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Persentase penyelesaian revisit transformasi kelembagaan Kemenkeu	100	Penguatan Internal atau Anggaran
22.	Tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu satu dalam ekosistem kolaboratif (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan well being	100	Penguatan Internal atau Anggaran
23.	Tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu satu dalam ekosistem kolaboratif (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Tingkat implementasi budaya Kemenkeu Satu	57,5	Penguatan Internal atau Anggaran
24.	Tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu satu dalam ekosistem kolaboratif (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100	Penguatan Internal atau Anggaran
25.	Pengawasan - pengendalian internal yang efektif (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Indeks integritas organisasi	96,42	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	

PERILAKU KERJA		
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas	Ekspektasi Khusus Pimpinan:

PERILAKU KERJA		
	- Bertindak proaktif	Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

27 Januari 2023

Pegawai yang Dinilai,	Pejabat Penilai Kinerja,
Ditandatangani secara elektronik	Ditandatangani secara elektronik
Febrio Nathan Kacaribu	Sri Mulyani Indrawati
197802272021211003	-

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2023

DUKUNGAN SUMBER DAYA	
1.	535 pegawai
2.	*Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.*

SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN	
1.	*Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan*

No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Indeks efektivitas kebijakan fiskal yang berdampak pada transformasi ekonomi						86	86
2	Tingkat efektivitas diplomasi keuangan internasional		85	85			85	85
3	Tingkat implementasi KEM PPKF Regional		50	50			100	100
4	Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara						100	100
5	Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara	100	100	100	100	100	100	100
6	Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi		86	86				86
7	Indeks digitalisasi layanan Kemenkeu		3	3			3	3

8	Indeks kualitas peraturan pelaksanaan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan						100	100
9	Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas						100	100
10	Indeks optimalisasi penyelesaian kebijakan FTA & CEPA						85	85
11	Indeks penyelesaian kebijakan pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan						100	100
12	Persentase rekomendasi kebijakan yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan						100	100
13	Indeks pengembangan kebijakan anggaran perubahan iklim di daerah	20	40	40	60	60	82,5	82,5
14	Persentase usulan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan keuangan internasional		95	95			95	95
15	Persentase publikasi hasil kajian sesuai rencana	100	100	100	100	100	100	100
16	Persentase pengelolaan Knowledge Management System yang optimal	95	95	95	95	95	95	95
17	Persentase dukungan penguatan kapasitas ALCO Regional						100	100
18	Persentase laporan perkembangan ekonomi keuangan yang tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100
19	Indeks kualitas pengelolaan Keuangan BA015	100	100	100	100	100	100	100

20	Persentase penyelesaian program IS dan DA Kemenkeu	23	46	46	69	69	92	92
21	Persentase penyelesaian revisit transformasi kelembagaan Kemenkeu		100	100			100	100
22	Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan well being	100	100	100	100	100	100	100
23	Tingkat implementasi budaya Kemenkeu Satu		20	20			95	95
24	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan		100	100			100	100
25	Indeks integritas organisasi						96,42	96,42

KONSEKUENSI	
1.	*Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.*
2.	*Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.*

27 Januari 2023

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,

Ditandatangani secara elektronik

Ditandatangani secara elektronik

Febrio Nathan Kacaribu

197802272021211003

Sri Mulyani Indrawati

-